



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL
NIM. 11327103569

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL
NIM. 11327103569

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2019 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

ASRIL S.HI, MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Persetujuan Skripsi
Saudara **M. Armando Karnobel**

Pekanbaru, 01 Mei 2019

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum
UIN SUSKA RIAU

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan pengarahannya serta perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara **Muhammad Armando Karnobel** yang berjudul: **PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN** telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Harapan saya semoga dalam waktu dekat ini saudara yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum. Demikianlah harapan saya mudah-mudahan skripsi ini berguna dan bermanfaat hendaknya.

Wassalam
Pembimbing,

ASRIL S.HI, MH
NIP. 19760420 200901 1 008



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN”**.

Yang ditulis oleh :

Nama : **MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL**
 NIM : 11327103569
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Agustus 2019

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Lovely Dwina Dahren, SH.,MH

.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NID. 19580712 198603 1 005





ABSTRAK

Muhammad Armando Karnobel (2019): **Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan atau yang dulu disebut pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dan perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Bahan mineral bukan logam dan batuan memiliki potensi yang cukup baik yang dapat dimanfaatkan apabila digali dan dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, dan meskipun secara target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun tahun belum tercapai, sehingga Pemerintah Kabupaten Kampar perlu kiranya melakukan kebijakan dan strategi yang matang untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian skripsi ini tentang Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 dan Kendala Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011.

Jenis penelitian ini merupakan *observational reseach* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 belum terlaksana dengan baik, hal itu dibuktikan dengan rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga dengan demikian diperlukan kebijakan atau solusi terkini dari pemerintah Kabupaten dalam penetapan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan agar wajib pajak kedepannya dapat melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2011. Sedangkan kendala Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 bahwa hambatan tersebut diantaranya : sumber daya manusia, besarnya tarif pajak sebesar 25%, birokrasi yang rumit dan sosialisasi yang kurang sehingga pelaksanaan suatu pemungutan Pajak Mineral Logam dan Batuan harus lebih ditingkatkan.

Kata kunci : *Penerimaan-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Kabupaten Kampar*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Kantor Camat Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar)" ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah Swt. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua penulis, Alm. Suparman, SH. dan Ibunda Yenita, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan Do'a kepada penulis
2. Bapak Prof DR. H.Akhmad Mujahidin, S,Ag M.A selaku Rektor UIN SUSK RIAU dan seluruh citivitas akademika UIN SUSKA RIAU Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. Drs. H. Surya A. Jamrah, Plt Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Bapak Dr. Drs. H. Ahmad Supardi Hasibuan, MA dan Wakil Rektor III UIN Suska Riau Bapak Dr. H. Promadi, M.Pd, beserta seluruh civitas Akademik UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Heri Sunandar MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH, MH dan Bapak Muslim, SAg, SH, M,Hum, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Bapak Firdaus, SH., MH. selaku Penasehat Akademik yang telah yang telah memberikan nasehat-nasehat yang baik serta membantu penulis dalam Perkuliahan ini...
6. Bapak Asril, SH, MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan dan mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

8. Kepada Bapak Ibuk pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, yang berkenang meminjamkan buku sebagai referensi bagi penulis.

9. Kepada teman-teman seperjuangan di organisasi terima kasih telah memberikan dorongan motivasi dan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada keluarga dari ibundaku terima kasih telah mengingatkan dan memberikan dorongan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan yang diberikan semoga Allah Swt membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin.

Wabillahiitaufig Walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 2 Juli 2019
Penulis

MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL
NIM. 11327103569



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengumpulan data untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

DAFTAR KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN.....	v
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Metodologi Penelitian.....	15
TINJAUAN UMUM TENTANG KABUPATEN KAMPAR.....	20
A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....	20
B. Letak Geografis.....	21
C. Keadaan Demografi.....	24
D. Keadaan Perkonomian.....	25
E. Arah dan Strategi Pembangunan	27
F. Sistem Pemerintahan.....	29
G. Keunggulan Daerah.....	29
TINJAUAN UMUM TEORITIS.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan.....	31
1. Pengertian.....	31
2. Pembagian Pajak.....	32
3. Sistem Pemungutan.....	34
4. Penggolongan Pajak Daerah.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	43
1. Pengertian.....	43
2. Pembagian Negara Hukum.....	44
3. Ciri-ciri Negara Hukum.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	46
1. Pengertian.....	46
2. Perbedaan Kewenangan dengan Kekuasaan.....	49



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B B V

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D.	Tinjauan Umum Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	50
	1. Pengertian	50
	2. Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	51
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A.	Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	53
B.	Kendala Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011.....	74
	KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	81

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang) tidak sah¹.

Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat. Konsekuensi atas paham kedaulatan rakyat adalah kekuasaan penguasa bersumber pada kehendak rakyat. Hukum yang berlaku berasal dari aspirasi atau kehendak rakyat yang mengikat penguasa karena dikehendaki dan sesuai perikehidupan rakyat. Hal ini disebabkan karena negara pada hakikatnya merupakan produk perjanjian di antara rakyat sehingga setiap hukum akan mengikat sepanjang disetujui secara bersama oleh rakyat dengan presiden (pemerintah).²

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.1

² *Ibid*, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik pada dasarnya untuk perekonomian kita mencapai tujuan pemerintahan itu sendiri yakni, menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan itu semua maka peran dari Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang harus dijalankan sebagaimana mestinya.³

Pembangunan nasional hakekatnya merupakan usaha pemerintah baik itu pusat maupun daerah dalam mencapai tujuan besar sesuai alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pembangunan daerah secara otonomi telah memberikan wewenang yang nyata, luas dan tanggung jawab termasuk didalamnya adalah pemberian sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu komponen utama desentralistik adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah yang berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan hanya dalam bentuk kaidah yang tertulis, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya terhadap hukum pajak yang diadakan oleh negara sebagai hukum positif yang

³ Pantja I Gde Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2

⁴ Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), h. 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung pula tujuan berupa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Keempat tujuan hukum pajak tidak hanya tertulis sebagai kata-kata hukum tertulis dalam undang-undang pajak, tetapi harus kelihatan dalam penerapannya sehingga hukum pajak betul-betul merupakan hukum fungsional yang mengabdikan kepada negara sebagai negara hukum dengan penampakan tujuan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi wajib pajak maupun pejabat pajak.⁵

Setiap negara menerapkan prinsipnya sendiri dalam perundang-undangan yang diadikannya acuan untuk pemungutan pajak. Prinsip-prinsip ini mencerminkan landasan filosofis yang dianut oleh suatu negara⁶, sehingga dalam upaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki system perpajakan dan retribusi daerah maka telah terbit Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbitan Undang-Undang tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang lebih ideal.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian dari Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.15-16

⁶ Rachamanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.⁷

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta

⁷ Ni' Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung:Nus Media, 2009), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan⁸. Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.⁹

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi

⁸Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian dan Peraturan Daerah)*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 19

⁹ Pantja I Gede Astawa, *Op.Cit*, h. 26



daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah¹⁰.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.¹¹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena

¹⁰ Warsito, *Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada 2001), h. 128

¹¹ Herlina Rahman, *Paduan Brevet Pajak*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.¹²

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kabupaten Kampar berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan disektor pajak dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah dalam hal sistem pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan yang diatur dalam Perda Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹³

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang signifikan sehingga sumber pendapatan pajak menjadi andalan bagi pembangunan nasional. Pajak dapat menjadi salah satu instrument bagi pemerintah untuk mengukur seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai penyelenggaraan negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan rill masyarakat.¹⁴

¹² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 16

¹³ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT. Eresco, 1997), h.

¹⁴ Mudzakir, *Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan hubungannya dengan hukum pidana umum dan khusus*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No. 1 Tahun 2011), h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang pajak adalah produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya¹⁵. Hukum selalu bertujuan member pedilan dan disamping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib hukum. Undang-undang Pajak mengandung ketentuan hukum material, ini meliputi subjek, objek dan tariff pajak, sehingga dalam pajak harus ditentukan secara jelas dan tegas siapa (subjek) yang dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak tersebut.¹⁶

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Era Otonomi Daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹⁷

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah yaitu :

- a. Hasil pajak daerah

1. Hasil retribusi daerah

¹⁵ Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 5

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Bandung: Eresco, 1991), h. 1

¹⁷ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), h. 16



Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk masa sekarang dan masayang akan datang.¹⁹

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada didaerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Pajak tersebut adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2014-2016 di Kabupaten Kampar

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2014	198,954,897,269	120,637,346,877	77 %
2	2015	209,163,284,183	134,798,726,103	75%
3	2016	215,727,826,204	141,429,183,991	74 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Tabel I.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun 2014-2016 di Kabupaten Kampar

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2014	2.532.705.240	1.852.726.240	68 %
2	2015	2.576.405.253	1.856.446.210	72 %
3	2016	2.552.726.240	1.859.926.357	71 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

¹⁹ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pemungutan pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan bahwa objek dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ini diantaranya : Asbes; Batu Tulis; Batu Setengah Permata; Batu Kapur; Batu Apung; Batu Permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam Batu (Halite); Grafit; Granit/Andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan Kerikil; Pasir Kuarsa; Perlit; Fosfat; Talk; Tanah Serap (Fuller Earth); Tanah Diatom; Tanah Liat; Tanah (Alum); Tras; Yarosif; Zeolit; Basal;²⁰

Sumber daya alam berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah merupakan potensi yang perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaanya dapat mendukung dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah atas pengambilan atau pemanfaatan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Perda No. 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan di Kabupaten

²⁰ Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2011



Kampar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan diantara 21 (dua puluh satu) ada beberapa Kecamatan yang dilintasi oleh Sungai Kampar yang merupakan sungai kebanggaan masyarakat Kabupaten Kampar diantaranya :

1. Kecamatan XIII Koto Kampar
2. Kecamatan Kampar Kiri Hulu
3. Kecamatan Bangkinang Barat
4. Kecamatan Bangkinang seberang
5. Kecamatan Siak Hulu
6. Kecamatan Kampar
7. Kecamatan Rumbio Jaya

Dari ke 7 (tujuh) Kecamatan diatas, maka penulis akan mengambil sampel di (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Bangkinang Seberang, karena sebahagian masyarakat di Kecamatan tersebut bermata pencaharian dari hasil alam yang terdapat di Sungai Kampar seperti melakukan penambangan di pinggiran sungai Kampar tersebut.

Dari hasil pra survey yang penulis lakukan di 3 (tiga) Kecamatan tersebut, maka penulis mendapati bahwa sepanjang muara sungai Kampar terdapat masyarakat yang melakukan penambangan pasir dan kerikil yang merupakan bagian dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Hal tersebut semakin meningkat keberadaannya sejak dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Namun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat disayangkan kebanyakan dari masyarakat yang melakukan penambangan tidak membayar pajak sebesar 25 % ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perda Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2011 tersebut. Melihat fenomena tersebut sangat disayangkan sekali, seharusnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sangat diuntungkan dengan keberadaan aktivitas penambangan ini, namun lagi-lagi hal tersebut tidak terealisasi, karena kebanyakan kegiatan penambangan ini dilakukan tidak mengantongi izin dan dilakukan secara illegal dengan memakai peran oknum aparat. Sehingga penambangan terhadap bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan tetap berjalan tanpa adanya kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 08 Tahun 2011. Berdasarkan fenomena tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar yang cukup besar, apakah potensi itu sudah efektif atau tidak dalam pemungutannya. Hal inilah yang akan diangkat oleh penulis sebagai pokok pembahasan dan penulisan Skripsi yang berjudul **“Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah menemukan spesifikasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya untuk itu perlu dikemukakan alasan-alasan tentang penyebab masalah yang diteliti tersebut perlu dibatasi yang bertujuan untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menhindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*), dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran, diantaranya :

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
2. Pendapatan Asli Daerah pendapatan asli daerah kota pekanbaru yang bersumber dari sektor pajak
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang melakukan pemungutan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011?
2. Apa Kendala Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kamal Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Untuk mengetahui Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Kampar sebagai aparat perpajakan, agar memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap wajib pajak serta mampu mensejahterakan masyarakat.
2. Secara teori, dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pajak pada umumnya dan pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada khususnya.

E. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.²¹

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah mengenai pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Badan Pendapatan Kabupaten Kampar adalah tempat pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan dalam melakukan transaksi pembayaran langsung kepada para wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 10



4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.²² Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian.²³ Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebanyak 1 Orang.
- b. Wajib pajak sebanyak 30 orang (10 Orang dari Kecamatan Bangkinang Seberang, 10 Orang dari Kecamatan Siak Hulu, dan 10 Orang Kecamatan XII Koto Kampar).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	1	1	Sensus
2.	Wajib Pajak	30	30	Random Sampling

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2018

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan kuesioner yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 118

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2007), h. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pajak, otonomi daerah, hukum tata negara, hukum administrasi negara, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, Jurnal dan Internet.

6. Metode Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden seperti Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Kuesioner Yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket yang menjadi responden kepada Wajib Pajak sebanyak 30 orang.

7. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan data dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan



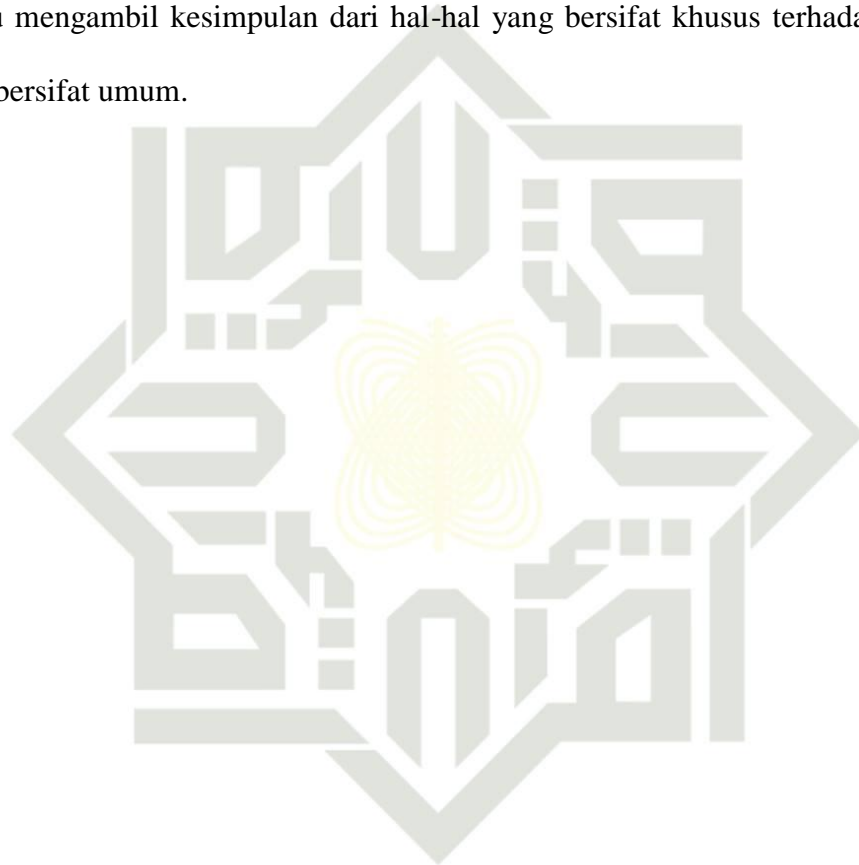
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian²⁴.

8. Metode Penarikan kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



UIN SUSKA RIAU

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan Kesebelas, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956²⁵. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.
- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

²⁵ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Letak Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut²⁶:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam

²⁶ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peregeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2010, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

Kabupaten Kampar juga memiliki sosok pejuang di zaman kolonial Belanda yang terkenal yakni Datuk Tabano dan Datuk Panglima Khatib. Saat ini Kabupaten Kampar memiliki 20 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah²⁷:

1. Bangkinang (Ibu kota: Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (Ibu kota: Kuok)
3. Bangkinang Seberang (Ibu kota: Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (Ibu kota: Kebun Durian)
5. Kampar (Ibu kota: Air Tiris)
6. Kampar Kiri (Ibu kota: Lipat Kain)
7. Kampar Kiri Hilir (Ibu kota: Sei.Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (Ibu kota:Gema)
9. Kampar Timur (Ibu kota: Kampar)

²⁷ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kampar Utara (Ibu kota: Desa Sawah)
11. Perhentian Raja (Ibu kota: Pantai Raja)
12. Rumbio Jaya (Ibu kota: Rumbio)
13. Salo (Ibu kota: Salo)
14. Siak Hulu (Ibu kota: Pangkalanbaru)
15. Tambang (Ibu kota: Sei.Pinang)
16. Tapung (Ibu kota: Petapahan)
17. Tapung Hilir (Ibu kota: Pantai Cermin)
18. Tapung Hulu (Ibu kota: Sinama Nenek)
19. XIII Koto Kampar (Ibu kota: Muara Mahat)
20. Kampar Kiri Tengah (Ibu kota: Simalinyang)

Kampar sangat identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari kerajaan minangkabau. Limo Koto terdiri dari XXXIII Koto Kampar, Kuok, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini. Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep adat dan persukuan minangkabau di Sumatera Barat. Tidak heran bila adat istiadat hingga bahasa sehari-hari warga Limo Koto amat mirip dengan Minang Kabau. Bahasa yang dipakai di Limo Koto, yang juga kemudian menjadi bahasa Kampar adalah bahasa Ocu. Di samping itu, Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional Calempong dan Oguong.²⁸

²⁸ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kebudayaan Kampar merupakan kebudayaan yang sangat tua, ini ditandai berdiri dengan megahnya sebuah candi muara takus, yang menjadi pusat kebudayaan kerajaan Sriwijaya.

Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun suatu perekonomian, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi bila diikuti dengan peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang besar dalam memacu gerak dan laju pembangunan. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu, penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan karena sebagai modal dasar dan juga sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan subjek ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional²⁹. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan sumber terpenting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan produksi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga pemimpin dan tenaga lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi. Namun bila dilihat pada kekekatnya bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diiringi oleh penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai akhirnya akan membawa konsekuensi terhadap tingkat kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Penduduk Kabupaten

²⁹ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar sangat heterogen, yang terdiri dari suku Minang, Melayu, Batak, Jawa, Flores, Cina, Sunda dan Nias.

Jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif yaitu 15-64 tahun berjumlah 449.882 jiwa atau 66,23 persen dari jumlah keseluruhan. Sementara itu penduduk yang tergolong dalam usia yang tidak produktif atau yang tergolong sudah tua dengan umur 65 tahun keatas adalah 21.268 orang atau 3,13 persen dari total penduduk Kabupaten Kampar.

D. Keadaan Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah. Indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menyatukan arah pembangunan di masa yang akan datang kondisi perekonomian Kabupaten Kampar.³⁰

Pendapatan regional dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi suatu wilayah. Dari hasil perhitungan PDRB Kabupaten Kampar dapat diketahui besarnya laju pertumbuhan dan struktur ekonomi Kabupaten Kampar. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas, maka telah terjadi kenaikan dari 3.773,57 milyar pada tahun 2016 menjadi 4.074,42 milyar pada tahun 2017. Artinya pertumbuhan

³⁰ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi Kabupaten Kampar pada tahun 2016 adalah 7,97 persen Berdasarkan perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas harga berlaku tanpa migas, sektor pertanian memiliki persentase distribusi terbesar yaitu 57,14 persen. Berdasarkan perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas harga konstan tanpa migas, sektor pertanian juga memiliki persentase distribusi terbesar yaitu 57,78 persen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Kampar masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber matapencahariannya. Sektor pertanian utama yang diandalkan adalah perkebunan kelapa sawit.

Lebih separuh kegiatan perekonomian (rata-rata 60,60 persen) di daerah Kabupaten Kampar berasal dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sebaliknya sektor listrik, gas dan air minum merupakan sektor yang paling rendah perannya dalam perekonomian Kabupaten Kampar. Berdasarkan analisis sektor dalam struktur perekonomian yang ada dalam PDRB Kabupaten Kampar, maka sektor yang menonjol perannya secara dominan adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalan. Kabupaten Kampar juga menjadi daerah utama bagi sektor penggalan di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan kondisi geografis alam yang lebih memiliki potensi bahan galian dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Riau³¹. Kabupaten Kampar memiliki bermacam jenis bahan galian, namun yang telah diusahakan secara ekonomis terutama bahan galian yang berkaitan dengan konstruksi/bangunan, antara lain pasir kuarsa, kerikil, tanah timbunan, dan batuan alam lainnya. Sedangkan batu bara juga merupakan potensi alam yang dimiliki

³¹ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Kampar, tetapi masih belum diusahakan secara ekonomis. Batu bara yang terdapat di Kabupaten Kampar merupakan salah satu cadangan bagi Provinsi Riau sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Ditinjau dari aktivitas ekonomi di Kabupaten Kampar, keberadaan aktivitas pertambangan dan penggalian di daerah ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi. Namun sektor pertanian yang juga merupakan sektor basis selain sektor tersebut diatas, menjadi salah satu peluang bagi pengembangan perekonomian masyarakat yang memang dari dahulu merupakan masyarakat agraris. Untuk itu, berbagai pihak termasuk pihak perbankan mempunyai peluang untuk berperan dalam pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

E. Arah dan Strategi Pembangunan

Pembangunan Kabupaten Kampar dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan dalam jangka panjang dan jangka menengah lima tahun. Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional, yang pada hakekatnya adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumberdaya secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.³²

Sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Kampar, yakni terwujudnya Kabupaten Kampar Negeri yang Agamis, Berbudaya, Berdaya dan Sejahtera tahun 2020, maka ditetapkan misi, strategi, arah kebijakan pembangunan

³² Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Kampar tahun 2014-2016 yang secara makro dituangkan kedalam Program Lima Tahun melalui Program Pembangunan Daerah (PROPERDA). Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kampar ke depan diantaranya adalah mengembangkan industri berbasis pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pada bidang ekonomi dititikberatkan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, yakni industri yang mengelola bahan mentah yang ada didaerah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa negara, perluasan kesempatan kerja serta keseimbangan struktur perekonomian daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor pertanian, industri dan perhubungan merupakan prioritas utama tanpa mengabaikan sektor lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan dengan didukung oleh sumberdaya manusia melalui pendidikan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan Kabupaten Kampar³³.

Pembangunan yang dilaksanakan ini, diharapkan akan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi yang merupakan syarat mutlak dalam pembangunan selanjutnya tanpa mengabaikan aspek pemerataan Pemerataan hasil pembangunan Kabupaten Kampar dilakukan dengan penyebaran pelaksanaan proyek pembangunan sesuai dengan konsep perwilayahan, terutama di daerah-daerah relatif tertinggal di Kabupaten Kampar. Secara spesifik, pembangunan sektor unggulan di Kabupaten Kampar adalah untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Kampar.

³³ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sistem Pemerintahan

Bupati Kampar saat ini adalah Catur Sugeng Susanto, SH untuk periode 2017-2022 yang dulunya adalah wakil Bupati dari Bapak Azis Zaenal, SH, MM, namun Bapak Azis Zaenal meninggal dunia, maka Bapak Catur Sugeng Susanto, SH, secara otomatis menggantikan posisi almarhum. Sebelumnya Bupati Kampar di jabbat oleh Ir. H. Jefry Noer yang terpilih pada pemilu yang dilaksanakan pada Oktober 2011, Ir. H. Jefry Noer terpilih sebagai bupati Kampar pada tanggal 15 Oktober 2011 untuk periode 2011-2016. Ir. H. Jefry Noer menggantikan Burhanuddin. Bupati yang sempat menggemparkan peta politik nasional dengan skandal pengusiran seorang kepala sekolah pada sebuah rapat dengar pendapat di DPRD Kampar. Jauh sebelum reformasi, Kampar selalu dipimpin oleh bupati yang berlatar belakang militer dengan mengabaikan latar belakang sosio kultural semisal putra daerah. Namun dengan digulirkannya otonomi daerah, kini Kampar memiliki pemimpin dari daerahnya sendiri.³⁴

C. Keunggulan Daerah

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat. Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan yang ada di Kabupaten kampar. Khusus perkebunan perkebunan sawit untuk saat ini kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hektare dengan potensi *coconut palm oil* (CPO) sebanyak 966 ribu ton.

³⁴ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di bidang perikanan budidaya ikan patin yang dikembangkan melalui kerambah (kolam ikan berupa rakit) di sepanjang sungai kampar, ini terlihat banyaknya keramba yang berjejer rapi di sepanjang sungai Kampar dan adanya kerjasama antara pemda kampar dengan PT Benecom dengan jumlah investasi 30 miliar yang mana kedepan kampar akan menjadi sentral ikan patin dengan 220 ton per hari.

Di segi pariwisata Kabupaten Kampar juga tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya, seperti Candi Muara Takus yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya, namun untuk saat ini pemda kampar belum memaksimalkan pengelolaannya menjadi tujuan wisatawan, Mandi "balimau kasai" tradisi ini adalah mandi membersihkan diri di sungai kampar untuk menyambut bulan suci Ramadhan. "Ma'awuo ikan" ini adalah menangkap ikan secara bersama-sama (tanpa larangan) setahun sekali, ini berada di danau Bokuok (Kec.Tambang) dan sungai Subayang desa Domo (Kec.Kampar Kiri hulu). Di samping julukan BUMI ARIMADU kabupaten Kampar juga terkenal dengan julukan SERAMBI MEKKAH di Propinsi Riau, ini disebabkan masyarakatnya yang sebagian besar beragama Islam (etnis ocu), demikian juga dengan pakaian yang sehari-hari yang dipakai bernuansa muslim.³⁵

³⁵ Kampar.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TEORITIS

Tinjauan Umum Tentang Perpajakan

1. Pengertian

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.³⁶

Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga disatu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 1999,



membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak.³⁷

2. Pembagian Pajak

Secara garis besarnya pajak di Indonesia dibagi 2 (dua), yaitu :³⁸

- a. Pajak Negara/Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara umumnya.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah Kabupaten dan kota guna pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” Apabila memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik dengan bertitik tolak dengan pendapat Adam Smith dan ekonom-ekonom Inggris yang lain, maka menurut Musgrave haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Penerimaan/ pendapatan harus ditentukan dengan tepat;

³⁷ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung 1992, h.24.

³⁸ *Ibid.*, h. 8

³⁹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1991, h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Distribusi beban pajak harus adil artinya setiap orang harus dikenakan pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya;

Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut akhirnya harus ditanggung.

Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian dalam hubungannya dengan pasar efisien.

Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal untuk mencapai stabilitasi dan pertumbuhan ekonomi.

6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas/pasti serta harus dipahami oleh wajib pajak.

7) Biaya administrasi dan biaya-biaya lain harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Untuk mempertahankan prinsip tersebut di atas, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut ⁴⁰:

Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya;

Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam;



- 3) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Melihat definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak daerah, pajak daerah dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh provinsi
- 2) Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /kota

Perbedaan kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yakni sebagai berikut ⁴¹:

- 1) Pajak provinsi kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan untuk pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan terdapat pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas objeknya harus melalui perubahan dalam Undang-undang.

Pajak Daerah oleh K. J. Davey dapat diartikan sebagai berikut:

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;

Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yakni⁴² :

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

4. Penggolongan Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak seperti tersebut di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Ibid, h. 40

Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Sejalananya Pajak Daerah saat ini yang hak kewenangan pemungutnya dapat diklasifikasikan menurut wilayah pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- 1) Pajak Daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan.
- 2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Reklame;
 - d) Pajak Hiburan;
 - e) Pajak Parkir;
 - f) Pajak Penerangan Jalan;
 - g) Pajak mineral bukan logam dan batuan.
 - h) Pajak air tanah
 - i) Pajak sarang burung wallet
 - j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
 - k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

He Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adanya objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak. Pada
ya objek pajak merupakan manifestasi dari *taatbestand* (keadaan yang
Dengan demikian, *taatbestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan
menurut peraturan perundangundangan pajak dapat dikenakan pajak⁴³.

ibatan pajak dari seorang wajib pajak muncul (secara objektif) apabila ia memenuhi *taatbestand*. Tanpa terpenuhinya *taatbestand* tidak ada pajak terutang yang harus dipenuhi atau dilunasi.

Pengertian subjek dan wajib pajak daerah dalam pemungutan pajak, merupakan dua istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Dalam beberapa jenis pajak, subjek pajak tidak sama dengan wajib pajak yakni setiap orang atau badan yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara otomatis menjadi wajib. Terminologi yang digunakan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, yang dimaksud

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objeknya ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan

R. Santoso Brotodiharjo, *Op.Cit.*, hlm. 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi essensial. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.⁴⁴

Pajak berfungsi sebagai budgetair, penerimaan keuangan yang masuk melalui kas negara dan berfungsi mengatur bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan masyarakat Indonesia. Pajak yang dipungut pada dasarnya merupakan perwujudan peran serta anggota masyarakat sebagai warga negara untuk membiayai keperluan Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional. setiap anggota masyarakat sebagai warga negara adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Oleh

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 1999,



- karena itu, anggota masyarakat sebagai wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaporkan dan membayar sendiri pajaknya yang terutang, ini berarti tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban pembayar pajak kepada negara/pemerintah sepenuhnya berada pada anggota masyarakat sebagai wajib pajak, sedangkan pemerintah hanya sebagai pelaksana dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kewajiban pajak dari setiap wajib pajak.⁴⁵
- Tanpa pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh terutama bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak tersebut, pemerintah telah melakukan pembaharuan perpajakan (*tax reform*) sejak tanggal 1 Januari 1984. Dengan pembaharuan perpajakan itu sistem perpajakan akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak serta cara pembayaran pajak. Dengan demikian diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup lubang-lubang yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak.⁴⁶
- Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis jika ditinjau dari segi jenisnya. Pada garis besarnya pembagian jenis pajak didasarkan pada sifatnya dan berdasarkan cirinya. Penjenisan pajak ini terdiri dari ⁴⁷:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebarkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Andi Subri, *Reformasi Peraturan Perundang-Undangan dan Birokrasi Bidang Perpajakan* Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No. 1 Tahun 2011, h. 29

⁴⁶ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung 1992, h.

24.

⁴⁷ Sudarsono, *Aturan Bea Meterai dan Kebijakan Pajak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.

1. Pajak pribadi (perorangan), dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang
2. Pajak kebendaan, yang diperhatikan obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan
3. Pajak atas kekayaan, yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan
4. Pajak atas bertambahnya kekayaan, pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan atau pertambahan kekayaan, biasanya hanya dikenakan satu kali
5. Pajak atas pemakaian (konsumsi), yaitu atas kenikmatan seseorang
6. Pajak yang menambah biaya produksi, yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati produsen

Pendekatan pajak dari segi hukum disebut hukum pajak. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi hukumnya, juga pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban, siapa yang berhak memungut pajak, apa kewajiban pemungut pajak terhadap wajib pajak, siapa wajib pajak, apa hak dan kewajiban wajib pajak terhadap fiscus (pemungut pajak), bagaimana cara pemungutan pajak, apa sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum pajak, apa arti sanksi administratif dan apa sanksi pidana.

Pendekatan dari segi hukum mencakup juga falsafah hukum pajak dan pembenaan (*rechtvaardiging*) pemungutan pajak. Oleh karena itu pajak dari segi



hukum dapat didefenisikan⁴⁸ perikatan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*Totbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan).

Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan untuk menopang proses pembangunan. Fungsi pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara sering disebut fungsi *budgeter*.

Keterkaitan pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formulasi tersebut sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan Negara (fungsi *regular*).

Sistem perpajakan, hendaknya dapat memenuhi kedua fungsi tersebut secara simultan. Penerimaan dari sektor pajak hendaknya dapat digunakan untuk mencukupi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, paling tidak pengeluaran-pengeluaran rutin. Proporsi penerimaan pajak terhadap seluruh penerimaan pemerintah, dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator stabilitas penerimaan

⁴⁸ Rochmat Soemitro, *op.cit.*, h. 12



- dan kemandirian negara dalam membiayai pengeluarannya. Semakin besar proporsi penerimaan pajak semakin besar pula kemandirian negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya⁴⁹.
- Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan⁵⁰:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) jo amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 23 A. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

⁴⁹ Miyasto, Seri Keadilan Fiskal dan Moneter Nomor 10, *Filosofi PBB dalam Konteks Keadilan dan Pembiayaan Pembangunan*, Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, PT. Bina Pustaka, Jakarta, 1993, h. 25

⁵⁰ Anggiat Sitanggang, *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebaiknya Pajak Daerah atau Pajak Pusat*, Policy Paper Series, Badan Analisa Fiskal, Depkeu RI, 2001, h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi, maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

b) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian

Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut negara hukum, dimana hakekat dari negara hukum haruslah dituntut lebih tinggi dari kekuasaan. Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau the *rule of law* yang hendak diperjuangkan dinegeri ialah suatu negara hukum dalam artian materil yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati.⁵¹

Pemikiran tentang Negara Hukum telah muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan mulai populer abad ke-19. Latar belakang munculnya pemikiran mengenai Negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang pernah terjadi dimasa lampau. Oleh karena itu unsure-unsur negara hukum mempunyai

⁵¹ Hariono, dkk, *Mengembangkan Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2003, h. 5



hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa⁵².

Dalam dokumen penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechstaat* yang berarti dua kurun setelah kata negara berdasarkan atas hukum, setelah amandemen ke-3 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kata negara Hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah menghilangkan nuansa *rechstaat* dari pengertian negara hukum.⁵³

2. Pembagian Negara Hukum

Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materil yang lebih mutahir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. Karena itu, Wolfgang Freidman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*" dan *rule of law*, dalam arti materil yaitu "*the rule of just law*".⁵⁴

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran

⁵² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010, h. 26

⁵³ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, h. 110

⁵⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichitjar, Jakarta, 1992, h. 9



pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti

1. Peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin terdapat substantif.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sistem konstitusi Negara, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal-Pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*recstaat*” bukan “*machstaat*”.

3. Ciri-ciri negara Hukum

Dalam konstitusi RIS tahun 1949, ide Negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kiranya, cita negara hukum yang mengandung 13 ciri yang dapat dipahami antara lain ⁵⁵:

- a. Supremasi Hukum
- b. Persamaan Dalam Hukum
- c. Asas Legalitas
- d. Pembatasan Kekuasaan
- e. Organ-organ campuran yang bersifat independen

⁵⁵ I Dewa Gede Atmaja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum : Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konkwen*, Universitas Udayana, Jakarta, 2004, h. 5



f. Peradilan bebas dan tidak memihak

g. Peradilan tata usaha negara

h. Peradilan Tata Negara

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

j. Bersifat demokratis

k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara

l. Transparansi dan control sosial

m. Berketuhanan Yang Maha Esa

C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁵⁶

Dewa Gede Atmaja, dalam penafsira konstitusi menguraikan sebagai berikut menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang

⁵⁶ SF. Marbun, Dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Adminitrasi Negara*, UI Press, Yogyakarta, 2001, h. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum public dalam hukum publik. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang

⁸*Ibid.* h. 4

1998, h. 20

1994, h. 65

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, 2004, h. 4



sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung

oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah adalah kekuasaan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yang benar.⁶² Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah.”⁶³

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”⁶⁴, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.⁶⁵ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah

⁶² Abdul Rasyid Thib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 219

⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Grmaedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, h. 35-36

⁶⁴ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga Surabaya, 1990, h. 30

⁶⁵ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kansius, Yogyakarta, 1990, h. 52



kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsure esensial dari suatu Negara dalam

- proses penyelenggaraan pemerintah disamping unsur-unsur lainnya, yaitu a)
 hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; kebijaksanaan;
 e) ketertibatan; f) kebajikan.⁶⁶

2. Perbedaan Kekuasaan dan Kewenangan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak, sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.⁶⁷ Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan, dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata, artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.⁶⁸

⁶⁶ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah Universitas Indonesia, Yogyakarta, Jakarta, 1998, h. 37-38

⁶⁷ Miriam Budiarjo, *Op.cit*, h. 35

⁶⁸ Rusadi Kantaprawira, *Op.cit*, h. 39



D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. Pengertian

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan sesuai peraturan perundang – undangan. Pajak ini dulunya dikenal dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2001. Pada Tahun 2011 Pemerintah daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Perda terbaru yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 yang nama pajaknya adalah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dasar hukum perubahan Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2. Objek dan Subjek

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2011 tentang objek, subjek dan wajib pajak serta dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah :

- a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi: Asbes, Batu Tulis, Batu Setengah Permata, Batu Kapur, Batu Apung, Batu Permata, Bentonit, Dolomit, Feldspar, Garam Batu (Halite), Grafit, Granit/Andesit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsidien, Oker, Pasir dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kerikil, Pasir Kuarsa, Perlit, Phospat, Talk, Tanah Serap (*Fuller Earth*), Tanah

Diatome, Tanah Liat, Tawas (Alum), Tras, Yarosif, Zeolit, Basal.⁶⁹

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

sebagaimana dimaksud adalah :

1) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

2) Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

b. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan untuk komersial.

c. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

d. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak :

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

⁶⁹ Pasal 2 ayat (2) Perda Kabupaten Kampar No. 8 Tahun 2011



2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud adalah dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai Jual pasar sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dalam wilayah Kabupaten Kampar.

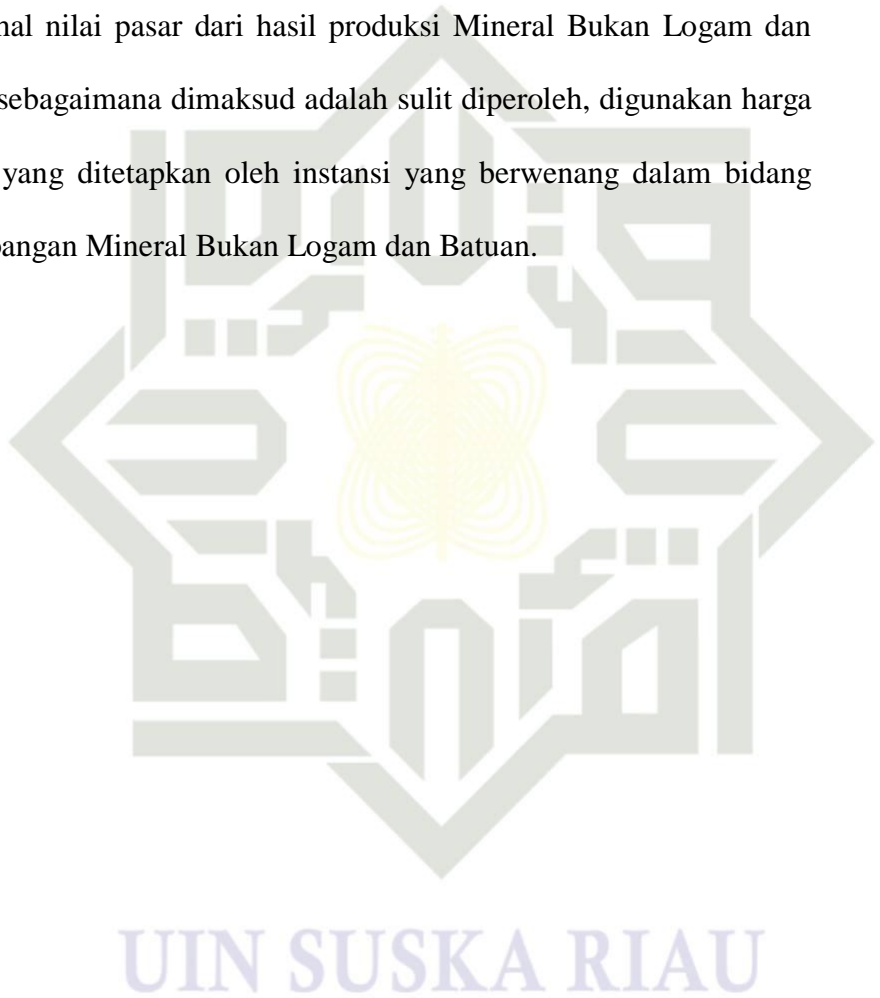
Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud adalah sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

P E N U T U P

Kesimpulan

Berdasarkan Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum terlaksana dengan baik, hal itu dibuktikan dengan rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar, karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga dengan demikian diperlukan kebijakan atau solusi terkini dari pemerintah Kabupaten dalam penetapan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan agar wajib pajak kedepannya dapat melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang tercantum dalam Perda Kabupaten Kampar No. 08 Tahun 2011.
2. Kendala Dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 bahwa hambatan tersebut diantaranya : sumber daya manusia, besarnya tarif pajak sebesar 25%, birokrasi yang rumit dan sosialisasi yang kurang



sehingga pelaksanaan suatu pemungutan Pajak Mineral Logam dan Batuan harus lebih ditingkatkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Kabupaten Kampar, maka penulis akan memberikan saran dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu :

1. Kepada Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Kampar yang tertuang dalam perda No. 08 Tahun 2011 sehingga hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Kepada Badan Pendapatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar harus dapat menganalisis potensi sebenarnya dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan lebih cermat lagi, dengan mendata pengusaha yang masih benar-benar aktif, dan melakukan sosialisasi sesering mungkin ke lokasi-lokasi bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan
3. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebaiknya memilih media informasi yang murah dan mudah dalam penyebarannya misalnya brosur yang berisi informasi tata cara penyetoran pajak sehingga memudahkan masyarakat untuk mengerti dan menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Herlina Rahman, *Paduan Brevet Pajak*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta, 2002,
- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2007
- Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- , *Pembaruan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian dan Peraturan Daerah)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008
- Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII Press, 2008
- Ni' Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nus Media, Bandung, 2009.
- Pantja I Gde Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta, 2011

Rachamanto Surahmat, *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Sebuah Pengantar*, Gramedia Pustaka Utama, 2001

Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 5, PT. Eresco Bandung, Bandung, 1997

Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung, 1991,

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010

Sudarsono, *Aturan Bea Meterai dan Kebijakan Pajak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Warsito, *Hukum Pajak*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2001

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

C. Jurnal

Mudzakir, *Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan hubungannya dengan hukum pidana umum dan khusus*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No. 1 Tahun 2011

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**"

yang dituli soleh :

Nama : **MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL**
NIM : 11327103569
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Magfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Lovely Dwina Dahren, SH.,MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN PROF. M. YAMIN, SH No. 83 TELP. (0762) 20259 FAX (0762) 322625
BANGKINANG

Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN

No. 800/Bapenda -Set /1233

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ZAMHUR, ST.
Nip : 19731012 199603 1 001
Pangkat / Gol : Penata Tk I/ III.d
Jabatan : Sekretaris
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Armando Karnobel
Nim : 11327103569
Jurusan : Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syariah dan Ilmu hukum
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU

Adalah benar Mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan riset/prariset pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
Sekretaris





a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2018/822

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/12792 tanggal 08 Agustus 2018, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL**
2. NIM : 11327103569
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**
8. Lokasi : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Pra Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Oktober 2018

an. **KEPALA KANR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasubbag. TU





PEMERINTAH PROVINSI RIAU **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/12792
 TENTANG



182010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5851/2018 Tanggal 8 Agustus 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

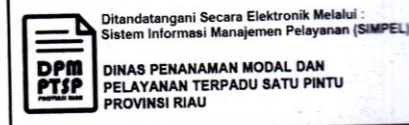
1. Nama : MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL
2. NIM / KTP : 11327103569
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PASAL 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
7. Lokasi Penelitian : DISPENDA KABUPATEN KAMPAR

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Agustus 2018



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7987/2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini
menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL
N I M : 11327103569
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **13 SEPTEMBER 2018**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 17 Oktober 2018

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD ARMANDO KARNOBEL**
NIM : **11327103569**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Judul : **PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN**

Pembimbing : **Asril, S.Hi., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 November 2019

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang
 - a. Peng
 - b. Peng
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Singkat Riwayat Hidup Penulis

Muhammad Armando Karnobel, Lahir di Bangkinang, 13 Desember 1994 anak pertama dari tiga bersaudara dari Pasangan Suparman Dan Yenita. Pada tahun 2001, penulis memulai pendidikan di SDN O13 Bangkinang sampai tahun 2007. Dan melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Bangkinang dan lulus pada tahun 2010, Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bangkinang Lulus pada tahun 2013.. Pada tahun 2013 Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil S1 di UIN SUSKA RIAU, Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2015 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Selanjutnya Pada Tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kampar Timur Desa Tanjung Bungo. Dan menyelesaikan tugas akhir dengan judul “PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN” di bawah bimbingan Bapak Asri; S.Hi,SH. MH.